

LAMPIRAN





DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai apa jawaban yang diberikan narasumber, adapun narasumber yang di wawancarai diantaranya yaitu Kepala Desa Kradinan, Sekretaris Desa, dan bendahara desa.

A. Akuntabilitas pengelolaan APBDes

1. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat supaya mengetahui dan bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?
2. Bagaimana bentuk perwujudan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan?
3. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan APBDes?
5. Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi?
6. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
7. Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa?
8. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa?
9. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa daam pembangunan desa?
10. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?
11. Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai dengan harapan?
12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes?

13. Apakah Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?

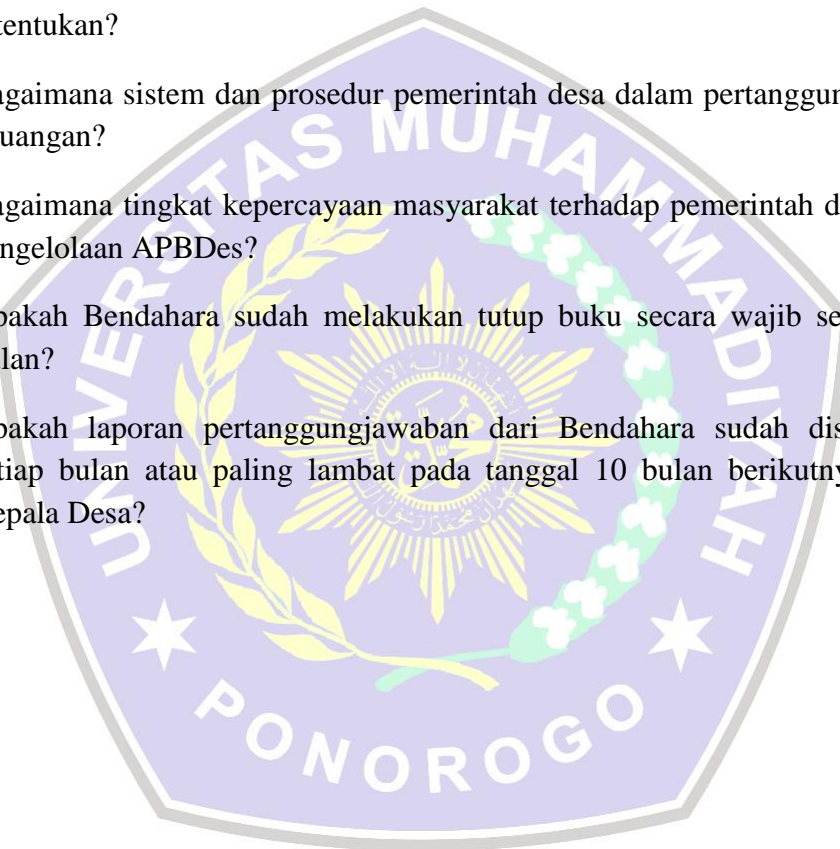
A. Transparansi Pengelolaan APBDes

1. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?
3. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa?
4. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa?
5. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?
6. Apakah rencana pembangunan yang ada di baliho APBDes tahun 2020 sudah berjalan sebagaimana mestinya?
7. Apakah semua warga yang berkepentingan bisa melihat informasi ADD?

B. Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes

1. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?
3. Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
4. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam prosedur perencanaan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?
7. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa?

8. Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai apa yang direncanakan?
9. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?
10. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?
11. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?
12. Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
13. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
14. Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan?
15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes?
16. Apakah Bendahara sudah melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan?
17. Apakah laporan pertanggungjawaban dari Bendahara sudah disampaikan setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa?





LAMPIRAN 2
HASIL WAWANCARA

A. Akuntabilitas pengelolaan APBDes

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat supaya mengetahui dan bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?	Satu, untuk akses APBDes lewat Banner atau poster-poster yang ada ditempel di setiap dukuh. Untuk yang lain-lain disitu ada semacam website/ Gmail Desa Kradinan yang bisa mengakses hanya aparat desa.
2	Bagaimana bentuk perwujudan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan?	Biasanya kita mengadakan LKPJ setiap tahunnya.
3	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa?	Untuk kelembagaan ya, biasanya di setiap semester disitu ada tahap-tahap itu diadakan musyawarah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk pelaksanaan fisiknya. Jika non fisiknya langsung mengakomodasi dengan TPK nya, disitu ada PPTKD di bidangnya.
4	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan APBDes?	Untuk pengelolaan APBDes, kalau fisik biasanya diikutsertakan untuk pekerja terutama, dan TPK di wilayah itu.
5	Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi?	Kalau untuk aturan dan pedoman sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai apa yang diaturkan sesuai prinsip kita pada rapat-rapat sebelum pengerjaan suatu proyek atau fisiknya gitu aja.
6	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Berarti di situ ada form nya Gmail itu mbak, untuk APBDes itu sudah dimasukkan dalam Gmail dan ada sistem penerapan dari pemerintah itu Siskodes, disitu siskodes dimonitor terus oleh sistem keuangan desa. Ada sistem keuangan desa yang online dan yang tahu hanya pihak pemerintahan.
7	Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa?	Kalau penyampaian kepada masyarakat biasanya lewat Musdes (musyawarah desa) atau Musdus (musyawarah dusun) gitu aja.

8	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa?	Sama juga mbak, sama dengan Musdes Musdus itu. Penyampiannya yang pasti kayak gitu.
9	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa daam pembangunan desa?	Ya sama lewat Musdes Musdus mbak.
10	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?	Kalau pengelolaan dana desa ya hampir ya juga sama lewat Musdes lewat Musdus dalam rapat-rapat tertentu yang sifatnya sosialisasi.
11	Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai dengan harapan?	Kami sudah melakukan dengan sebaik mungkin mbak, akan tetapi kan masyarakat pendapatnya masing-masing, ada yang puas dan kurang puas.
12	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes?	Untuk penghambatnya tidak ada insyaallah. Kalau pendukungnya tergantung dari pemerintahan mbak.
13	Apakah Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?	Sudah mbak pasti. Kalau tidak ya kita kena sanksi

B. Transparansi Pengelolaan APBDes

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Kalau untuk transparansi, biasanya lewat RT, iya yang musyawarah kan RT atau tokoh-tokoh masyarakat.
2	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?	Hampir sama juga begitu mbak. Kalau langsung ke masyarakat langsung individu-individu ya jarang.
3	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban	Sama juga mbak lewat RT atau tokoh-tokoh masyarakat.

	pemerintah desa dalam pengelolaan desa?	
4	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Pertama kita adakan rapat Musdes Musdes yang dihadiri RT dan tokoh-tokoh masyarakat lalu di situ kita infokan untuk pertanggungjawabannya.
5	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?	Untuk sistem atau prosedur sudah mbak.
6	Apakah rencana pembangunan yang ada di baliho APBDes tahun 2020 sudah berjalan sebagaimana mestinya?	Kalau hasil pembangunan ya memang belum merata mbak, kemarin di Rt 30 katanya kan mau ada perngaspalan jalan. Tapi sampai sekarang masih belum ada apa-apa itu mbak. Mungkin karena masih pandemi makanya masih terhambat proses pembangunannya.
7	Apakah semua warga yang berkepentingan bisa melihat informasi ADD?	Oh itu saya ya kurang paham mbak, memang desa tidak terlalu terbuka untuk informasi-informasi yang berhubungan dengan Keuangan ADD. Jadi kalau tidak ada pengumuman dari RT, para warga tidak tahu apa-apa.

C. Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku?	Sudah
2	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?	Dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ada di desa Kradinan, setelah sebelumnya kepala desa telah mensosialisasikan program-program yang telah direncanakan pihak desa melalui musdes musdes. Lalu melaksanakan musyawarah lagi untuk rencana pembangunan.
3	Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Tahapnya pertama, kita lihat di lapangan kalau sistem fisik. Kalau non fisik kita ya hampir sama juga dilapangan seperti pelatihan,

		<p>pemberdayaan atau pembinaan, itu kan kita hanya ngikutidari masyarakat apa yang mau diajukan. Mulai dari serap aspirasi, setelah serap aspirasi dimasukkan dalam rangkaian Musdus. Di musdus kita sudah masuk semua, kita pilah-pilah mana prioritas yang pertama atau prioritas apa yang tahun itu mau dibangun, apa yang didulukan ataupun pemberdayaan dan pembinaan.</p>
4	Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?	Kita nanti melaporkan ke kecamatan lalu ke pemerintahan.
5	Siapa saja yang dilibatkan dalam prosedur perencanaan pengelolaan dana desa?	Semua masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat.
6	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?	Untuk itu hanya aparat desa mbak yang tahu.
7	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa?	Selalu mbak
8	Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai apa yang direncanakan?	Sudah
9	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?	<p>Kalau prosedurnya, biasanya mulai dari Musdus nanti disaring dalam Musdes langsung kita masukkan dalam APBDes. Apa yang prioritas atau emergensi yang harus didulukan (Sekretaris Desa).</p> <p>Kalau APBDes ya dimulai dari Musdus per dusun ya mbak, dari usulan per dusun itu kemudian dirangkum terus diambil prioritasnya, setelah itu dimasukkan dalam rapat APBDes untuk anggaran tahun berikutnya (Bendahara Desa).</p>
10	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?	
11	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?	Pelaporannya ya seperti SPJ, tapi kalau untuk pelaporan pengelolaan ya seperti itu juga surat pertanggungjawaban.
12	Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban	Untuk kita tidak.

	dana desa?	
13	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Sudah
14	Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan?	Pertanggungjawaban ke pemerintah disitu biasanya ada SPJ-SPJ kita masukkan dari sini, yang mengoreksi dari pihak Kecamatan maupun dari Kabupaten.
15	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes?	Untuk tingkat kepercayaannya tergantung dri masyarakat itu menganalisa dari mana, tergantung personal masing-masing warga soalnya ada yang tahu ada yang tidak. Masalahnya kadang kalau APBDes, apabila tidak ke kantor desa jarang orang mau tanya. Biasanya kalau hanya sosialisasi di warung atau dilain tempat hanya sosialisasi sedikit sekali yang intinya hanya untuk lingkungan sekitar situ saja.
16	Apakah Bendahara sudah melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan?	Sudah, setiap bulan dilaporkan ke kepala desa juga pemerintah.
17	Apakah laporan pertanggungjawaban dari Bendahara sudah disampaikan setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa?	Kalau kita gak begitu mbak. Kita membuat SPJ sesuai termin kita membuat SPJ kemudian dilaporkan.

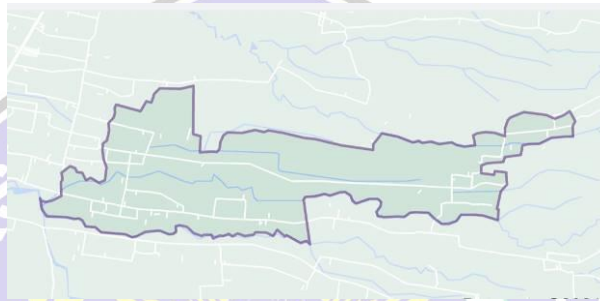
LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI





Gambar 1.2 Profil Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun



Gambar 1.3 Peta Wilayah Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Kampung Tangguh Semeru Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun



Gambar 1.5 Struktur Organisasi PPKM MIKRO Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun



Gambar 1.6 Dokumentasi Kegiatan Kampung Al- Qur'an



Gambar 1.7 Penyuluhan Pentingnya PROKES Dalam Masa Pandemi Covid 19



Gambar 1.8 Kegiatan Sosialisasi Vaksinasi Covid – 19



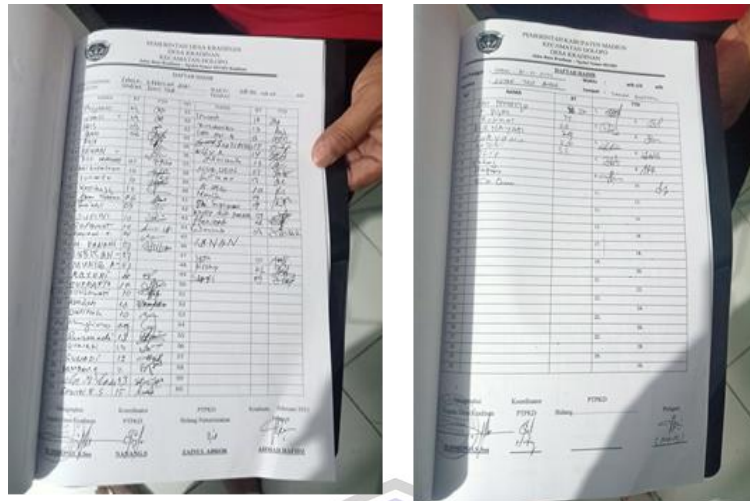
Gambar 1.9 Evaluasi



Gambar 1.10 Papan Informasi



Gambar 1.11 Kegiatan Fisik membangun Irigasi Persawahan



Gambar 1.12 Daftar Hadir Musyawarah Desa



Gambar 1.13 Laporan APBDes Tahun 2020



Gambar 1.14 Dokumentasi Wawancara

